

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 3 HURUF B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PEMELIHARAAN
DAN PERBAIKAN JALAN**
(Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay
Bahuga Kabupaten Way Kanan)

ARTIKEL ILMIAH

Oleh:

**IZA RATU PAMENAN
NPM : 2121020205**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 3 HURUF B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PEMELIHARAAN
DAN PERBAIKAN JALAN**
(Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay
Bahuga Kabupaten Way Kanan)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Tugas Dan Syarat Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Program
Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**IZA RATU PAMENAN
NPM : 2121020205**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.
Pembimbing II: Susi Nurkholidah, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan di Kampung Bumi Harjo ditinjau dari *Fikih Siyasaḥ Tanfidziyah*, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model *Interaktif Miles dan Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang kampung. Dari perspektif *Fikih Siyasaḥ Tanfidziyah*, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

KATA KUNCI : *Fikih Siyasaḥ Tanfidziyah; Peraturan Daerah; Kerusakan Jalan; Partisipasi Masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) The implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 concerning road maintenance and repair in Bumi Harjo Village from the perspective of Fiqh Siyasa Tanfidziyah, and (2) the efforts made by the government and the community in overcoming road damage in the region. This study employs a qualitative approach with a case study research method. Data collection was conducted through in-depth interviews with village officials, community leaders, and local residents, direct field observations, documentation, and literature review. The research instruments used included interview guidelines, field notes, and observation sheets. The data analysis technique utilized the interactive model by Miles and Huberman, which encompasses data reduction, data display, and conclusion drawing. (1) The results of the study indicate that the implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 has not been fully effective, as many road sections have suffered severe damage for extended periods. The local government is deemed unresponsive to community aspirations, with budget constraints cited as the primary reason for delayed repairs. (2) The community demonstrates active participation by engaging in mutual cooperation (gotong royong), improving drainage systems, and proposing repair programs through village development planning deliberations (Musrenbang). From the perspective of Fiqh Siyasa Tanfidziyah, this reflects a weak execution of the principles of trust (amanah) and public welfare by the government. This study emphasizes the importance of synergy between the government and the community in realizing fair and sustainable public services in accordance with Islamic law.

KEYWORDS : *Fikih Siyasa Tanfidziyah; Regional Regulation; Road Damage; Community Participation*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iza Ratu Pamenan
NPM : 2121020205
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syār'īyyāh*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan (Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026
Penulis,



Iza Ratu Pamenan
NPM.2121020205



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

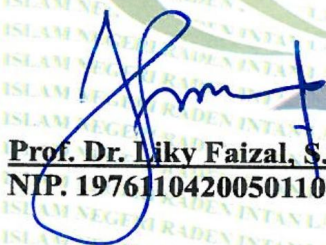
Judul Artikel : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan (Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)
Nama : Iza Ratu Pamenan
NPM : 2121020205
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004


Susi Nurkholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**


Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP.197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan (Studi Di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)”** disusun oleh Iza Ratu Pamenan, NPM: 2121020205, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*), telah diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: kamis, 30 juli 2026

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Liky Faisal, M.H. (.....)

Penguji III : Susi Nurkholidah, M.H. (.....)



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

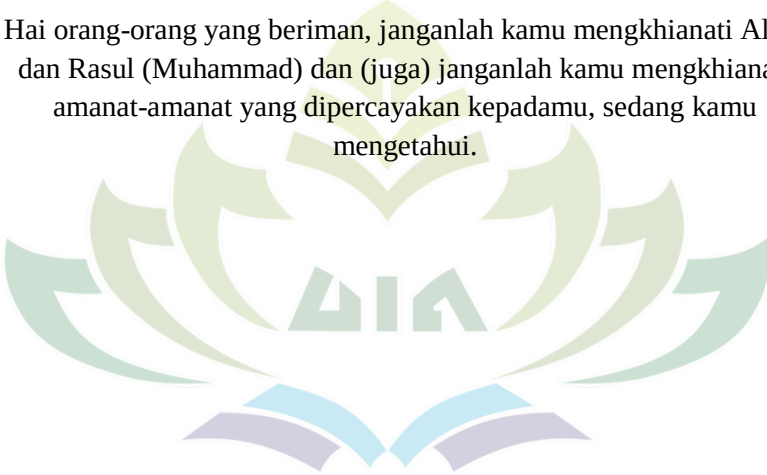
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa’ ayat: [58])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas segala takdir-Nya. Berkat doa dan usaha, penulis dapat menjadi pribadi yang berpikir, beradab, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita di masa depan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rafdinal dan Ibu Nila Sari Terima kasih atas setiap doa yang senantiasa Bapak dan Ibu panjatkan dalam setiap sujud dan munajat. Sebagai wujud bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan, doa, serta pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjuanganku dalam menempuh pendidikan ini. Segala pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan tidak akan pernah mampu kubalas, kecuali dengan selemba karya ini yang tertulis sebagai ungkapan cinta dan persembahan tulus dariku. Setiap kata dan huruf dalam karya ini, setiap lelah yang kurasakan, dan setiap langkah yang kujalani selama menempuh pendidikan, tidaklah sebanding dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu curahkan kepadaku. Terima kasih telah memilihku menjadi anak perempuan satu satunya di hidup kalian. Maafkan aku yang hingga saat ini belum mampu membalas segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Semoga suatu hari kelak aku dapat membanggakan Bapak dan Ibu serta menghadirkan senyum keikhlasan di wajah kalian. Bapak dan Ibu adalah alasan terbesarku untuk terus berjuang hingga detik ini.
2. Untuk Ketiga Saudara laki-lakiku, Yusif Ramu Pamenan, Afifi Rismu Pamenan, dan Ghazy Qithmir Pamenan. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu

diberikan. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang selalu menguatkan dan membantu dalam berbagai keadaan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan bagiku untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

3. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Bastari Ansori dan Abdul Afif Isa atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini hingga selesai.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syari'ah pada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberi wadah untuk penulis dalam menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Iza Ratu Pamenan, lahir di Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada 21 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Penulis dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pendidikan, dan kerja keras. Dukungan, kasih sayang, serta doa dari kedua orang tua dan keluarga menjadi motivasi utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Pendidikan formal penulis dimulai di TK Darul Ulum, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Bumi Harjo dan menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Buay Bahuga, kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Buay Bahuga hingga lulus. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis senantiasa berupaya mengembangkan kemampuan akademik, memperluas wawasan keilmuan, serta meningkatkan kualitas diri sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis



Iza Ratu Pamenan
NPM.2121020205

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan artikel ilmiah ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar‘iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ini.
3. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar‘iyyah*), serta Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara ibu Nurahmah, M.H. Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
4. Seluruh sivitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, serta staf Fakultas Syari’ah yang telah banyak

membantu penulis, khususnya dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan penyusunan artikel ini.

5. Bapak Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi demi kesempurnaan artikel ini.
6. Pihak Perangkat Kampung Bumi Harjo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membantu dalam memperoleh data yang diperlukan.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tatanegara, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan artikel ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi diri.

Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan fiqh siyasah, serta bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ARTIKEL ILMIAH.....	1
Abstrak	1
Pendahuluan	3
Metode Penelitian.....	6
Hasil dan Pembahasan	7
Kesimpulan.....	19
Kontribusi Penulis	19
Daftar Rujukan	20
LAMPIRAN.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian	24
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	25
Lampiran 3. Surat Izin Mengadakan Penelitian	27
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian.....	28
Lampiran 5. Kartu Konsultasi Artikel	29
Lampiran 6. Surat Keterangan Validasi Sitasi.....	30
Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	31
Lampiran 8. <i>LOA (Letter of Acceptance)</i>	35
Lampiran 9. Bukti Publikasi Artikel Ilmiah	36
Lampiran 10. Proses Revisi	37
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara, Observasi dan Tabel Wawancara.....	38
Lampiran 12. Script Artikel Yang Telah Terpublikasi	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jalan menuju sekolah, Kantor Camat, kantor polsek , koramil dan pasar	9
---	---



**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT 3 HURUF B PERATURAN
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
JALAN AN ANALYSIS OF SIYASAH TANFIDZIYAH ON THE
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 PARAGRAPH (3)
LETTER B OF WAY KANAN REGENCY REGULATION
NUMBER 11 OF 2011 CONCERNING ROAD MAINTENANCE
AND REPAIR**

Iza Ratu Pamenan¹, Liky Faizal², dan Susi Nurkholidah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jalan Letnan Kolonel H Jl.Endro Suratmin, Sukarame, Kec.Sukarame,
Kota Bandar Lampung

Email: izaratupamenan10@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan di Kampung Bumi Harjo ditinjau dari *Fikih Siyasaah Tanfidziyah*, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model *Interaktif Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang kampung.

Dari perspektif *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

KATA KUNCI : *Fikih Siyasah Tanfidziyah; Peraturan Daerah; Kerusakan Jalan; Partisipasi Masyarakat*

ABSTRACT: *This study aims to determine: (1) The implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 concerning road maintenance and repair in Bumi Harjo Village from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, and (2) the efforts made by the government and the community in overcoming road damage in the region. This study employs a qualitative approach with a case study research method. Data collection was conducted through in-depth interviews with village officials, community leaders, and local residents, direct field observations, documentation, and literature review. The research instruments used included interview guidelines, field notes, and observation sheets. The data analysis technique utilized the interactive model by Miles and Huberman, which encompasses data reduction, data display, and conclusion drawing. (1) The results of the study indicate that the implementation of Article 44, paragraph (3), letter b of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 has not been fully effective, as many road sections have suffered severe damage for extended periods. The local government is deemed unresponsive to community aspirations, with budget constraints cited as the primary reason for delayed repairs. (2) The community demonstrates active participation by engaging in mutual cooperation (gotong royong), improving drainage systems, and proposing repair programs through village development planning deliberations (Musrenbang). From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, this reflects a weak execution of the principles of trust (amanah) and public welfare by the government. This study emphasizes the importance of synergy between the government and the community in realizing fair and sustainable public services in accordance with Islamic law.*

KEYWORDS : *Fikih Siyasah Tanfidziyah; Regional Regulation; Road Damage; Community Participation*

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah pekampungan¹. Jalan yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga menjadi jalur penting bagi akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan tersedia dan dapat diakses secara layak oleh masyarakat².

Dalam konteks kebijakan perencanaan wilayah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah³. Adapun pasal 44 ayat 3 berisi: Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan; b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten serta jembatan; c. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu; d. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba; e. mengembangkan roda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan trayek cabang; f. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dan stasiun kereta api di Blambangan Umpu, Way Tuba, Giham dan Negeri Agung; g. membangun tempat pemberhentian bus atau angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan; h. pengembangan sistem prasarana transportasi udara untuk

¹ Muhammad Rofi Reyhan Khalidsyah, Dwiki Adi Putra, and Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, "Peran Kepala Kampung Dalam Pengelolaan Infrastruktur Kampung Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan Di Kampung Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin," *TheJournalish: Social and Government* 6, no. 2 (2025): 183–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v6i2.900>.

² Fitra Akbar et al., "PERAN HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ACEH UTARA," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 3 (2024).

³ Peraturan Daerah, "PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2031" (2011).

mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan i. pengembangan pusat latihan pertahanan dan keamanan. Secara eksplisit pasal 44 ayat 3 huruf b menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dalam melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Salah satu wilayah yang memerlukan perhatian khusus mengenai masalah infrastruktur adalah kampung Bumi Harjo, di mana berbagai hambatan pembangunan fisik kerap dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Kondisi fasilitas umum yang belum memadai di kampung ini tidak hanya menghambat mobilitas dan roda perekonomian warga, tetapi juga mencerminkan adanya tantangan dalam efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, realitas di lapangan ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, khususnya untuk melihat sejauh mana peran aktif serta tanggung jawab operasional pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan infrastruktur yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kampung Bumi Harjo ini adalah salah satu kampung berkembang di kecamatan buay bahuga, dengan berbagai fasilitas penunjang seperti Bank, Kantor Polsek, Kantor Kecamatan, Sekolah, Koramil, Pasar, dan Puskesmas Pembantu (Pustu), serta tempat wisata (air terjun). Kehadiran infrastruktur tersebut mencerminkan kemajuan Kampung dalam aspek sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masyarakat Kampung Bumi Harjo masih menghadapi permasalahan serius terkait kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan ini menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta akses menuju fasilitas-fasilitas penting yang tersedia di kampung⁴. Oleh karena itu, meskipun tergolong sebagai Kampung berkembang, Kampung Bumi Harjo masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal perbaikan dan pembangunan jalan guna menunjang kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kondisi infrastruktur jalan di Kampung Bumi Harjo, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Way Kanan, memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara ketentuan normatif dalam peraturan dan

⁴ Nur Khaerat Nur et al., *Sistem Transportasi* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

kenyataan yang dialami masyarakat. Banyak ruas jalan di Kampung tersebut mengalami kerusakan berat selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan penanganan yang layak dari pemerintah daerah. Meskipun laporan dan aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui forum-forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tindak lanjut dari pihak pemerintah cenderung lambat dan tidak transparan. Pemerintah berdalih bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan mutlak ketika hak dasar masyarakat atas aksesibilitas dan pelayanan publik yang layak diabaikan.⁵

Kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mengganggu ekonomi, menaikkan biaya transportasi, menurunkan produktivitas, membahayakan keselamatan, dan membatasi akses ke layanan dasar⁶. Kondisinya lebih parah di daerah perkampungan seperti Kabupaten Way Kanan, termasuk Kampung Bumi Harjo. Berdasarkan data per tanggal 09 Juni 2025 sumber data wawancara kepada sekretaris kampung, hasil survei lapangan menyatakan jalan rusak di Kampung Bumi Harjo adalah sepanjang 7 kilometer⁷. Jenis kerusakan yang utama adalah jenis kerusakan berat seperti lubang, bebatuan, retakan, dan tanah longsor.

Dalam perspektif Islam, fenomena ini dapat ditinjau melalui kerangka *Fikih Siyasa Tanfidziyah*, *siyasa tanfidziyah* ialah cabang ilmu politik Islam yang secara khusus mengkaji kewenangan, kebijakan operasional, dan tindakan administratif lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan negara berada di garda terdepan untuk mengeksekusi kebijakan publik demi kemaslahatan rakyat.⁸ Pemerintah berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai

⁵ Arif Fikri et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

⁶ Wafiq Azizah Hasibuan et al., "Studi Kasus Dampak Jalan Rusak Terhadap Mobilitas Dan Aktivitas Mahasiswa Di Mustamindo, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, RIAU," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 2.

⁷ Karimun, "Wawancara Dengan Karimun Sekretaris Kampung Di Balai Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 09 Juni 2025" (2025).

⁸ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasa," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

pelayan umat dengan prinsip *Maslahah* (kemanfaatan umum) dan *Amanah* (tanggung jawab)⁹. Ketika negara atau pemerintah daerah gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi yang tidak hanya bersifat *legalistik*, tetapi juga *etik* dan *normatif*¹⁰. Sayangnya, kajian yang secara spesifik menghubungkan pelaksanaan peraturan daerah terkait infrastruktur dengan nilai-nilai *Fikih Siyash* di tingkat lokal masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan jalan di Kampung Bumi Harjo dari Perspektif *Fikih Siyash Tanfidziyah*. Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi untuk menggali data faktual yang bersifat kontekstual. Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kampung, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Bumi Harjo yang secara langsung terlibat dan terdampak oleh kondisi kerusakan jalan serta proses implementasi peraturan daerah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan peran dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan infrastruktur di Kampung. Aparat kampung dipilih karena mereka bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaporan pembangunan kampung. Tokoh masyarakat mewakili suara kolektif warga dan mengetahui sejarah pembangunan kampung, sedangkan warga dipilih berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam menghadapi kerusakan jalan.

Metode pengumpulan data meliputi tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar memperoleh informasi yang luas namun tetap terfokus; (2) Observasi lapangan,

⁹ Nur Wahidillah et al., "Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, Dan Implementasi Di Era Kontemporer," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.488>.

¹⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Manajemen Pelayanan Publik* (Bumi Aksara, 2022).

digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik jalan serta aktivitas warga terkait perbaikan jalan, dan (3) Dokumentasi berupa foto-foto kerusakan jalan, surat pengajuan perbaikan, serta berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mendukung data lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, catatan lapangan, lembar observasi, serta kamera untuk dokumentasi visual.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model *Miles* dan *Huberman* yang Interaktif. Model ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, mengarahkan, dan fokus pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua yakni Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan, dan matriks tematik yang mempermudah penarikan makna. Dan terakhir Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara bertahap dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menemukan pola, hubungan, dan makna mendalam yang berkaitan dengan implementasi kebijakan serta prinsip *Fikih Siyash Tanfidziyah*. Langkah-langkah analisis ini dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian, tidak hanya setelah data terkumpul, guna menjaga keterkaitan antara data yang diperoleh dan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan di Kampung Bumi Harjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pemeliharaan dan perbaikan jalan belum berjalan optimal di Kampung Bumi Harjo. Peraturan daerah ini menegaskan betapa pentingnya membangun sistem jaringan transportasi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan antar wilayah. Infrastruktur jalan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan keterpaduan sistem pergerakan orang dan barang, dan merupakan pilar utama konektivitas antar-kampung dan kecamatan¹¹.

¹¹ Imma Widyawati Agustin and Septiana Hariyani, *Pengelolaan*

Aksesibilitas yang merata dan terintegrasi yang diharapkan dari kebijakan tersebut akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat waktu tempuh, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar pemenuhan aspek teknis dan fisik semata, melainkan fondasi vital yang berfungsi sebagai penggerak utama roda perekonomian lokal, pembuka isolasi wilayah, serta pilar penunjang mobilitas warga dalam menjalankan berbagai aktivitas produktif sehari-hari. Lebih dari itu, ketersediaan jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan mencerminkan perwujudan nyata dari kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan, sehingga disparitas antarwilayah dapat ditekan, kesejahteraan masyarakat kampung dapat ditingkatkan secara signifikan, dan cita-cita pembangunan yang inklusif serta berkesinambungan dapat benar-benar terwujud dalam tataran praksis¹².

Kerusakan jalan di kampung Bumi Harjo sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan belum mendapatkan penanganan yang memadai dari pihak terkait. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung di beberapa titik jalan utama kampung, seperti jalan poros penghubung antara Dusun 2 dan Dusun 9, serta akses menuju pasar, Balai Kampung, kantor polisi dan kantor kecamatan, yang permukaannya telah mengalami keretakan parah, berlubang besar, dan tergenang air saat musim hujan. Di beberapa bagian lainnya, seperti jalan menuju area wisata dan perkebunan warga, aspal telah mengelupas, menyisakan permukaan tanah berbatu yang sangat menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Bahkan menurut keterangan warga, jalan tersebut sudah mengalami

Infrastruktur Kota Dan Wilayah (Universitas Brawijaya Press, 2023); Amar Bhattacharya, Mattia Romani, and Nicholas Stern, *Infrastructure for Development: Meeting the Challenge*, CCCEP, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and G, vol. 24, 2012; Yogita Shamdassani, "Rural Road Infrastructure & Agricultural Production: Evidence from India," *Journal of Development Economics* 152 (2021): 102686, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102686>.

¹² Septiana Aulia et al., "Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang," *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)* 4, no. 1 (2024): 36–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1>; Viona Retno Oktaviani et al., "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 9882–92.

kerusakan sejak lima belas tahun terakhir. Akibat kerusakan yang berlangsung lama ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan menjadi terganggu, karena mobilitas warga yang seharusnya lancar menjadi terhambat.

Gambar 1. Jalan menuju sekolah, Kantor Camat, kantor polsek , koramil dan pasar



Penulis melakukan wawancara langsung dengan aparat kampung serta warga untuk mendapatkan data mendalam tentang masalah infrastruktur jalan di Kampung Bumi Harjo. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi jalan yang rusak, tanggapan masyarakat, dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah Kampung untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kebijakan daerah, terutama Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan, telah diterapkan di tingkat kampung.

Menurut Karimun selaku sekretaris kampung Bumi menjelaskan bahwa Pemerintah Kampung telah memperhatikan masalah kerusakan jalan di Kampung Bumi Harjo sejak lama. Jalan utama yang menghubungkan antar dusun mengalami kerusakan yang signifikan, terutama selama musim hujan, katanya. Jalan yang berlubang dan penuh dengan genangan air mengganggu aktivitas masyarakat seperti transportasi hasil pertanian dan akses ke sekolah. Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah Kampung telah mengajukan proposal perbaikan jalan ke pemerintah kabupaten, tetapi anggaran belum diberikan. “Kami dari Pemerintah Kampung tidak

tinggal diam, Sudah beberapa kali kami sampaikan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tapi memang belum ada realisasi secara menyeluruh” katanya¹³.

Menurut Ibu Nila Sari salah satu warga kampung, jalan-jalan di Kampung Bumi Harjo telah rusak sejak lama, terutama di bagian jalan poros yang sering digunakan oleh warga untuk melintasi antar dusun “Jalan poros itu, apalagi yang dari Dusun II ke Dusun IV, kondisinya parah banyak lubang besar, terutama selama musim hujan, yang licin dan becek debunya juga tebal jika kemarau.” Selain itu, dia menjelaskan bahwa kondisi jalan menyebabkan kerusakan pada kendaraan. “Kalau pas ada posyandu atau pelatihan, banyak ibu-ibu yang telat datang.” Mereka bahkan kadang-kadang tidak ikut karena kesulitan naik motor. Dia juga mengatakan bahwa jalan licin pernah menyebabkan orang jatuh. Bahkan jalanan tersebut sulit di akses dengan berjalan kaki karena tidak meratanya struktur tanah dan banyak bebatuan di sepanjang jalan. Pemerintah Kampung telah diberitahu tentang masalah jalan ini melalui rapat dan proposal kegiatan, tetapi dia mengatakan bahwa dana Kampung tidak mencukupi, jadi masih banyak yang harus dibagi¹⁴.

Menurut Yanto seorang petani dan pemilik warung di Dusun III, mengatakan bahwa kondisi jalan di kampungnya sangat memengaruhi kehidupan warga. Dia mengatakan, “Jalan lubang di mana-mana, dan kalau hujan itu akan menjadi kubangan, motor sering mengalami slip, Saya juga pernah bawa pisang ke pasar dan saya jatuh karena jalan berlumpur.” Ia juga menyatakan bahwa kerusakan jalan memengaruhi bisnis dan hasil pertanian secara langsung. Oleh karena itu, hasil panen kadang-kadang telat dijual, dan kadang-kadang bahkan busuk. Jika jalan rusak, warung saya juga sepi, Orang-orang tidak suka keluar rumah, katanya¹⁵.

Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat di simpulkan bahwa implementasi Pasal 44 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 belum berjalan efektif. Kerusakan

¹³ Karimun, “Wawancara Dengan Karimun Sekertaris Kampung Di Balai Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 09 Juni 2025.”

¹⁴ Nila Sari, “Wawancara Dengan Warga kampung Kampung Di Balai Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 09 Juni 2025,” (2025).

¹⁵ Yanto, “Wawancara Dengan Warga Kampung Di Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 10 Juni 2025,” (2025).

jalan di Kampung Bumi Harjo telah berlangsung lebih dari 15 tahun dan belum mendapatkan perbaikan signifikan dari pemerintah kabupaten. Jalan yang rusak meliputi jalur utama penghubung antar dusun, akses menuju pasar, sekolah, kantor kecamatan, hingga Puskesmas Pembantu. Kondisi ini memengaruhi kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan Sekretaris Kampung dan warga, yang menyatakan bahwa usulan perbaikan telah disampaikan berulang kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun tidak pernah ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah kabupaten. Ketidakhadiran anggaran atau minimnya transparansi penggunaan anggaran menjadi alasan klasik yang terus berulang. Realitas ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

Dalam perspektif Fikih *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah (*al-wali* atau *ulil amri*) memiliki kewajiban untuk menunaikan amanah dalam bentuk pelayanan publik yang menjamin kemaslahatan rakyat¹⁶. Salah satu bentuk pelayanan itu adalah penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jalan, yang menjadi urat nadi bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kaidah penting dalam fikih siyasah menyebutkan bahwa “*Tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*” (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat)¹⁷. Bila penguasa atau pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan menkampung, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *siyasah syar’iyyah*¹⁸.

¹⁶ Andri Astuti et al., “Kepemimpinan Dalam Islam,” *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 01 (2022): 72–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>; George Soros Setiawan Day, “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48.

¹⁷ Nandani Zahara Mahfuzah and Dhiauddin Tanjung, “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda,” *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 254; Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

¹⁸ Andi Herawaty et al., “Konsep Amanah Dalam Perspektif Fikih Siyasah : Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif” XX, no. April (2025): 77–84.

Temuan penelitian ini secara umum kompatibel dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frandani (2022) di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat¹⁹. Dalam penelitiannya, Frandani menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani jalan rusak dari perspektif fikih siyasah. Ia menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab publik belum berjalan maksimal. Pemerintah cenderung lambat dalam merespons keluhan masyarakat, penanganan dilakukan secara parsial, dan tidak berbasis pada perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat. Dalam konteks fikih siyasah, Frandani menyimpulkan bahwa pemerintah daerah gagal memenuhi prinsip *masalahah* dan *tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut. Dalam konteks Kampung Bumi Harjo, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga tidak memberikan respons konkret terhadap kerusakan jalan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Meskipun laporan dan usulan telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak ada realisasi kebijakan maupun alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan menkampung masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya pola kelambanan birokrasi dan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan, sebagaimana juga ditemukan oleh Frandani.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan tematik dengan temuan Trisna et al. (2021) yang menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*²⁰. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih sangat terpusat (*top-down*) dan kurang

¹⁹ Haris Frandani, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menaggulangi Jalan Rusak Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

²⁰ Yani Trisna, Sulastris Caniago, and Dian Pertiwi, "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 39–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2871>.

melibatkan aspirasi serta partisipasi masyarakat. Trisna et al. juga mencatat bahwa mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, sehingga masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, bukan pelaku aktif.

Temuan-temuan ini diperkuat dalam penelitian, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Bumi Harjo akhirnya mengambil alih fungsi pemerintah dengan melakukan gotong royong dan swadaya perbaikan jalan. Partisipasi aktif warga ini sebenarnya mencerminkan bentuk *hisbah* dalam Islam, yaitu kontrol dan koreksi masyarakat terhadap kelalaian penguasa²¹. Namun, partisipasi ini tidak diakomodasi ke dalam sistem formal pembangunan Kampung atau kabupaten, sehingga tidak berdaya mengubah kebijakan struktural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini kompatibel dengan dua studi sebelumnya, baik dari sisi temuan maupun kerangka teoritik. Ketiganya sama-sama menyoroti Kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip *tanfidziyah*, Lemahnya respons terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, Minimnya integrasi partisipasi warga ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun, penelitian ini juga memiliki keunggulan dan kebaruan dibanding penelitian terdahulu. Pertama, fokus penelitian ini sangat spesifik yaitu pada Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, bukan hanya generalisasi peran pemerintah secara umum. Kedua, cakupan penelitian dilakukan di tingkat Kampung sebagai unit mikro pelaksanaan kebijakan, sehingga menghasilkan gambaran nyata tentang relasi antara struktur kebijakan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, pendekatan yang digunakan berbasis Fikih Siyasah Tanfidziyah secara aplikatif, dan bukan hanya sebagai wacana normatif, menjadikannya relevan sebagai model evaluasi kebijakan lokal dalam konteks Islam. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya memperluas pemahaman terhadap krisis pelaksanaan kebijakan publik dari kacamata etika pemerintahan Islam,

²¹ Yulinda Sholikhatul Amalia, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dustūriyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021); Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttaharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 55–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

serta mendorong reformulasi kebijakan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip *Maslahah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih siyasah, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Dengan mengkaji implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dalam perspektif *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti *maslahah*, *amanah*, dan *tanfidziyah* dapat digunakan secara aplikatif untuk mengevaluasi efektivitas dan etika kebijakan publik modern. Hal ini memperluas pemahaman bahwa fikih siyasah bukan sekadar teori pemerintahan klasik, tetapi juga merupakan paradigma etika pemerintahan kontemporer yang relevan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tentang urgensi membangun sistem pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan perlunya reformulasi sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar menjadi forum aspiratif yang dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan, serta mendorong agar inisiatif swadaya warga difasilitasi dalam kebijakan resmi, bukan sekadar dipuji secara seremonial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian terbatas hanya pada satu kampung, yaitu Kampung Bumi Harjo, sehingga generalisasi temuan ke konteks daerah lain masih terbatas. Kedua, penelitian ini belum melibatkan instansi teknis secara langsung, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga belum terdapat informasi detail mengenai aspek perencanaan dan realisasi anggaran. Ketiga, dokumentasi partisipasi warga dalam bentuk data kuantitatif juga

belum dilakukan secara menyeluruh, karena sebagian besar data yang diperoleh bersifat kualitatif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian dan kebijakan ke depan adalah perlu dilakukan di beberapa Kampung lain untuk melihat pola yang lebih luas dan memperoleh generalisasi temuan terkait implementasi perda infrastruktur di daerah. Melibatkan Dinas PUPR dan DPRD untuk mengkaji sinergi antar lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan infrastruktur daerah. Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pemanfaatan data spasial (peta kerusakan jalan, sebaran anggaran), akan memperkaya validitas dan kedalaman analisis. Direkomendasikan agar pendekatan *Fikih Siyasah Tanfidziyah* digunakan sebagai kerangka evaluasi oleh akademisi dan praktisi kebijakan publik Islam dalam menilai kinerja pemerintahan di berbagai sektor, tidak terbatas pada infrastruktur.

Upaya yang di Lakukan Untuk Menangani Kendala dalam Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menangani Kerusakan Jalan di Kampung Bumi Harjo Menurut Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah

Dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari tugas tanfidziyah. Kesejahteraan umum yang harus diusahakan oleh negara, harus didefinisikan sebagai kesejahteraan yang memungkinkan semua anggota masyarakat hidup dengan baik ²². Mencari solusi alternatif muncul ketika infrastruktur mengalami kerusakan dan menanganinya terhambat oleh kendala struktural. Dalam kasus Kampung Bumi Harjo, ketidak mampuan untuk menerapkan Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah mendorong Pemerintah Kampung dan masyarakat untuk mengambil tindakan bersama sebagai tanggapan atas stagnasi pembangunan. Fenomena

²² S Pd Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (CV. Azka Pustaka, 2021); Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa* (Amzah, 2022).

tersebut terlihat dalam upaya kolektif pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung Bumi Harjo dalam menghadapi kerusakan jalan yang berkepanjangan.

Pemerintah Kampung Bumi Harjo secara resmi menyampaikan aspirasinya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Permintaan perbaikan jalan yang dibahas di forum tersebut kemudian berkembang menjadi proposal yang dikirim ke pemerintah kecamatan dan kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung telah merespon sistem perencanaan pembangunan secara struktural. Namun, kendala utama untuk melaksanakan program tersebut adalah kekurangan anggaran dan kurangnya prioritas dari pemerintah kabupaten.

Masyarakat Bumi Harjo memulai inisiatif swadaya sebagai tanggapan atas tanggapan pemerintah kabupaten yang lambat. Salah satu bentuk nyata dari tindakan ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan secara teratur untuk menimbun jalan yang rusak dengan batu dan pasir. Perbaikan jalan dilakukan dengan bimbingan tokoh masyarakat dan partisipasi seluruh masyarakat. Aktivitas ini menunjukkan nilai solidaritas sosial yang tinggi, meskipun hasilnya sementara. Kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial didefinisikan dalam fikih siyasah sebagai partisipasi warga dalam menjaga kemaslahatan umum²³.

Selain menambal jalan, masyarakat juga memperbaiki siring atau saluran air untuk mencegah kerusakan berulang. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan di Kampung adalah genangan air yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, kerja bakti dilakukan untuk memperbaiki aliran air agar badan jalan tidak terluka. Ini adalah upaya masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Gotong royong yang ditunjukkan dalam pembenahan siring menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya hubungan antara infrastruktur dan lingkungan.

²³ Nun Ainun Hasan and Adriana Mustafa, "PARTISIPASI WAHDAH ISLAMIYAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyah* 3, no. 3 (2022): 537–48.

Disisi lain, pembangunan jalan dan pelebaran saluran air dibantu oleh Dana Kampung oleh Pemerintah Kampung. Meskipun dana yang tersedia terbatas dan harus didistribusikan ke berbagai sektor, Pemerintah Kampung tetap bertanggung jawab atas upaya ini atas nama warganya. Sebagai pelayan publik, Pemerintah Kampung bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bawah. Namun, proyek berskala besar seperti pengaspalan dan pelebaran jalan masih membutuhkan dana di tingkat kabupaten atau provinsi. Pembangunan akan sangat lambat jika tidak ada intervensi dari pihak berwenang yang lebih tinggi.

Masyarakat Bumi Harjo sangat memperhatikan transparansi anggaran. Mereka meminta informasi tentang alokasi dan pelaksanaan anggaran pembangunan dipublikasikan. Dalam fikih siyasah, prinsip amanah menempatkan penguasa sebagai perwakilan umat yang harus bersikap adil dan jujur²⁴. Ketertutupan informasi hanya akan menambah jarak antara warga dan orang-orang yang mereka pimpin. Transparansi sekarang menjadi salah satu ukuran utama akuntabilitas pemerintahan.

Kerusakan jalan ke ranah publik yang lebih luas diangkat dengan aktif oleh masyarakat melalui media sosial dan teknologi informasi. Seperti video, dan foto warga diunggah ke akun pemerintah daerah dan diunggah ke platform seperti YouTube dan Facebook. Media digital telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan tekanan publik dan secara damai menyuarakan keprihatinan warga²⁵. Dalam fikih siyasah, ini adalah jenis *amar ma'ruf nahi munkar* dengan media yang relevan dengan zaman²⁶. Selama hak-hak rakyat dilindungi, advokasi undang-undang jenis ini diizinkan.

²⁴ Roidatus Shofiyah et al., "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 84–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>; Zenal Setiawan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

²⁵ Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.

²⁶ Firman Ali, "Representasi Qs. Al-Imran: 104 'Analisis Atas Nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Konten Video Tiktok (VT) Dakwah Muezza,'" *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2023): 1–13,

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan politik ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat Bumi Harjo. Mereka tidak hanya memahami hak-haknya tetapi juga tahu cara memperjuangkannya. Jika terjadi kelalaian penguasa, rakyat Islam memiliki hak untuk menegur dan mengkritik mereka. Untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, prinsip-prinsip ini telah berkembang menjadi dasar yang sangat penting. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat masuk ke dalam mekanisme check and balance yang diakui oleh syariat.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kampung Bumi Harjo menunjukkan praktik Fikih *Siyasah Tanfidziyah* lokal. Model kolaborasi rakyat dan pemimpin dibentuk oleh kombinasi antara jalur formal yang ditunjukkan melalui proposal dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan jalur swadaya yang ditunjukkan melalui gotong royong dan pembenahan siring. Namun, sebagai pemegang otoritas struktural, pemerintah kabupaten tetap bertanggung jawab utama. Kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan akan berkurang jika pembangunan jalan tidak dimulai segera. Oleh karena itu, Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Way Kanan harus diterapkan sebagai alat kebijakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sekadar aturan formal.

Kebaruan dari temuan ini adalah menempatkan upaya masyarakat sebagai aktor aktif dalam fikih siyasah, bukan sekadar pelengkap, dan memperlihatkan praktik tanfidziyah lokal yang tidak banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya.

Implikasi praktisnya, jika pola swadaya terus berlangsung tanpa intervensi struktural, maka kelelahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan partisipatif kolaboratif dan menjadikan inisiatif warga sebagai indikator prioritas kebijakan. Keterbatasan bagian ini adalah tidak semua bentuk gotong royong dan pembiayaan warga terdokumentasi secara sistematis.

Rekomendasinya, pemerintah Kampung perlu mengarsipkan seluruh kegiatan swadaya warga sebagai bahan bukti partisipatif yang bisa diperkuat dalam perencanaan anggaran ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Perbaikan jalan di Kampung Bumi Harjo belum berjalan dengan optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh kerusakan jalan yang telah berlangsung lama tanpa penanganan dari pemerintah kabupaten. Temuan ini menjawab tujuan pertama penelitian bahwa pelaksanaan perda tidak mencerminkan prinsip pelayanan publik yang adil dan maslahat sebagaimana diatur dalam *Fikih Siyasah Tanfidziyah*.

Tujuan kedua juga terpenuhi, yaitu mengidentifikasi upaya masyarakat dan pemerintah Kampung dalam menangani masalah ini. Masyarakat terbukti aktif melakukan gotong royong, perbaikan drainase, hingga menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) dan media sosial. Ini mencerminkan prinsip hisbah dan partisipasi publik yang kuat dalam fikih siyasah.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah penerapan konsep *Fikih Siyasah Tanfidziyah* secara aplikatif dalam mengevaluasi kebijakan publik daerah. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar penting bagi pemerintah daerah untuk mereformasi sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup wilayah yang terbatas pada satu Kampung serta belum melibatkan dinas teknis secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ke depan melibatkan lebih banyak wilayah dan instansi terkait, menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif-kualitatif, serta menjadikan fikih siyasah sebagai kerangka evaluatif untuk memperkuat etika kebijakan publik berbasis syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, Imma Widyawati, and Septiana Hariyani. *Pengelolaan Infrastruktur Kota Dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Akbar, Fitra, Audry Salsabila Pasaribu, I Ketut Astawa, Clara Bunga Larasati, and Diana Sari. "PERAN HUKUM INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ACEH UTARA." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 3 (2024).
- Ali, Firman. "Representasi Qs. Al-Imran: 104 'Analisis Atas Nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Konten Video Tiktok (VT) Dakwah Muezza.'" *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2023): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.429>.
- Amalia, Yulinda Sholikhatul. "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāṣah Dustūriyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Astuti, Andri, Zahratul Afiyah, Septia Ningsih, Agus Pranata, and Ridho Tawakkal Jannah. "Kepemimpinan Dalam Islam." *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 01 (2022): 72–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/edu.v2i01.29939>.
- Aulia, Septiana, Sabrina Nur Anisa, Afreizka Indah, M Arif Krui Dipa, and Maya Panorama. "Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang." *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)* 4, no. 1 (2024): 36–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1>.
- Bhattacharya, Amar, Mattia Romani, and Nicholas Stern. *Infrastructure for Development: Meeting the Challenge*. CCCEP, Grantham Research Institute on Climate Change and

- the Environment and G. Vol. 24, 2012.*
- Day, George Soros Setiawan. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48.
- Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Fikri, Arif, Rudi Santoso, Habib Shulton A, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Frاندani, Haris. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menaggulangi Jalan Rusak Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Hasan, Nun Ainun, and Adriana Mustafa. "PARTISIPASI WAHDAH ISLAMIYAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyyah* 3, no. 3 (2022): 537–48.
- Hasibuan, Wafiq Azizah, Fatimah Depi Susanti, Nabila Zaskia, and Nur Hasni Zahrah. "Studi Kasus Dampak Jalan Rusak Terhadap Mobilitas Dan Aktivitas Mahasiswa Di Mustamindo, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, RIAU." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 2.
- Herawaty, Andi, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Universitas Negeri Makassar, Penulis Koresponden, Fikih Siyasah, Pejabat Eksekutif, and Politik Islam. "Konsep Amanah Dalam Perspaktif Fikih Siyasah: Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif" XX, no. April (2025): 77–84.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Karimun. "Wawancara Dengan Karimun Sekertaris Kampung Di Balai Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 09 Juni 2025." 2025.
- Khalidsyah, Muhammad Rofi Reyhan, Dwiki Adi Putra, and Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain. "Peran Kepala Kampung Dalam Pengelolaan Infrastruktur Kampung Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan Di Kampung Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin." *TheJournalish: Social and Government* 6, no. 2 (2025): 183–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v6i2.900>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda." *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 254.
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa*. Amzah, 2022.
- Nur, Nur Khaerat, Parea Rusan Rangan, Mahyuddin Mahyuddin, Hasmar Halim, Miswar Tumpu, Gito Sugiyanto, Louise Elizabeth Radjawane, Siti Nurjanah Ahmad, and Erly Ekayanti Rosyida. *Sistem Transportasi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Oktaviani, Viona Retno, Anggun Lestari, Ginta Ahmad Prayudha, and Anas Malik. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 9882–92.
- Peraturan Daerah. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2031 (2011).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, 2022.
- Ridwan, S Pd. *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*. CV. Azka Pustaka, 2021.

- Rizha, Fachrur. "Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 123–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>.
- Sari, Nila. "Wawancara Dengan PKK Kampung Di Balai Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 09 Juni 2025." 2025.
- Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.
- Shamdasani, Yogita. "Rural Road Infrastructure & Agricultural Production: Evidence from India." *Journal of Development Economics* 152 (2021): 102686. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102686>.
- Shofiyah, Roidatus, M Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar Abdul Majid. "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 84–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.
- Trisna, Yani, Sulastri Caniago, and Dian Pertiwi. "IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2871>.
- Wahidillah, Nur, Shifa Rosa Apriyani, Vanessa Ria Meilani, and Zahwa Mutia Ashari. "Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, Dan Implementasi Di Era Kontemporer." *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.488>.
- Yanto. "Wawancara Dengan Warga Kampung Di Kampung Bumi Harjo Pada Tanggal 10 Juni 2025." 2025.

LAMPIRAN 1

Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Objek Penelitian	Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat 3 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan
Metode Penelitian	Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus.
Sumber Data	Sumber data diperoleh dari wawancara dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala Kampung , perangkat Kampung setempat dan Masyarakat. penelitian yang Instrumen digunakan meliputi observasi, wawancara tidak terstruktur, dokumentasi.
Sifat Penelitian	Deskriptif kualitatif, menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan secara mendalam.

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara

Wawancara Kepala Kampung

1. Bagaimana kondisi jalan di Kampung Bumi Harjo saat ini?
2. Sejak kapan kerusakan jalan mulai menjadi permasalahan utama?
3. Apakah pemerintah kampung telah mengusulkan perbaikan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan?
4. Melalui mekanisme apa usulan tersebut disampaikan (Musrenbang, proposal, atau lainnya)?
5. Apakah Dinas PUPR atau Pemerintah Kabupaten pernah turun langsung melakukan survei kondisi jalan?
6. Kendala apa yang menyebabkan perbaikan jalan belum terealisasi?
7. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki jalan?
8. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan Pasal 44 Ayat (3) Huruf b sudah berjalan dengan baik?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perspektif amanah dan kemaslahatan masyarakat?

Wawancara Sekretaris Kampung

1. Berapa panjang ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kampung Bumi Harjo?
2. Jenis kerusakan apa yang paling banyak ditemukan?
3. Apakah terdapat data atau dokumen mengenai usulan perbaikan jalan?
4. Berapa kali usulan tersebut diajukan ke pemerintah kabupaten?
5. Apakah ada balasan atau respon resmi dari pemerintah daerah?
6. Bagaimana dampak kerusakan jalan terhadap pelayanan masyarakat?

Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kondisi jalan di Kampung Bumi Harjo?
2. Apa dampak kerusakan jalan terhadap kehidupan masyarakat?
3. Apakah masyarakat pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah?
4. Bagaimana bentuk gotong royong yang dilakukan warga?
5. Menurut Ibu, apakah pemerintah sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik?
6. Bagaimana nilai amanah dan keadilan seharusnya diterapkan dalam pembangunan jalan?

Wawancara Warga Setempat

1. Sudah berapa lama jalan di sekitar tempat tinggal Bapak mengalami kerusakan?
2. Bagaimana kondisi jalan saat musim hujan dan musim kemarau?
3. Apa dampak kerusakan jalan terhadap pekerjaan atau usaha Bapak?
4. Apakah kerusakan jalan pernah menyebabkan kecelakaan atau kerusakan kendaraan?
5. Apakah Bapak mengetahui adanya usulan perbaikan jalan dari pemerintah kampung?
6. Pernahkah Bapak ikut gotong royong memperbaiki jalan?
7. Apa harapan Bapak kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait perbaikan jalan?

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN MENGADAKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1229/Un.16/DS/PP.009/05/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

14 Mei 2025

Kepada Yth.
 Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : IZA RATU PAMENAN
 NPM : 2121020205
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH WAY KANAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN DALAM MENANGANI KERUSAKAN JALAN DI DESA BUMI HARJO (Studi di Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)
 Lokasi Penelitian : Desa Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nur

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. IZA RATU PAMENAN

LAMPIRAN 4

SURAT BALASAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN BUAY BAHUGA
KAMPUNG BUMIHARJO

Alamat: Jln Raya Mesir Ilir Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan Kode Pos 34767

Bumiharjo, 18 November 2024

Nomor : 070/001/BH-BB/XI/2024
 Lampiran : -
 Prihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah
 Di _ Tempat

Denagn Hormat,
 Berdasarkan surat Nomor : B.2995/Ui.16/SD/PP.009/11/2024 Tanggal 14 November 2024 Prihal
 Permohonan Izin Pra Riset guna penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
 Lampung. Dengan ini memberi izin kepada mahasiswa :

1. NAMA : IZA RATU PAMENAN
2. NIM : 2121020205
3. Program Studi : Hukum Tata Negara (Syiasah Syar'iyah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima dan
 mengizinkan untuk melaksanakan Pra Riset Dengan Judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH
 TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH WAY KANAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH DALAM MENANGANI KERUSAKAN JALAN DI DESA BUMIHARJO" di
 Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga .Demikian surat ini kami sampaikan agar kiranya
 dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

Mengetahui :

PJ KEPALA KAMPUNG BUMIHARJO



LIRA CHINTIANA, S.T

NIP.19871102 201101 2 006

LAMPIRAN 5

KARTU KONSULTASI ARTIKEL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703298

KARTU KONSULTASI ARTIKEL

Nama : Iza Ratu Pamenan
NPM : 2121020205
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Pembimbing Akademik I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
Pembimbing Akademik II : Susi Nurkholidah, M.H.
Judul Skripsi : "TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN"

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	27 Mei 2024	Konsultasi Proposal untuk di semikanan		
2	13 November 2024	Bimbingan dan ACC Proposal		
3	15 Januari 2025	Bimbingan Revisi Proposal Pembimbing II		
4	15 Januari 2025	Bimbingan Revisi Proposal Pembimbing I		
5	25 September 2025	Bimbingan Artikel Pembimbing II		
6	2 Oktober 2025	Bimbingan Revisi Artikel Pembimbing II		
7	22 Juni 2026	ACC Artikel Pembimbing II		
8	22 Juni 2026	Bimbingan dan ACC Artikel Pembimbing I		

Bandar Lampung, 22 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Susi Nurkholidah, M.H.
NIP. 199305032020122021

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN VALIDASI SITASI



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : IZA RATU PAMELIAN

NPM : 2121070205

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2026
 Rumah Jurnal

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sakarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3558/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Iza Ratu Pamenan	2121020205	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Juli 2026
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERU...

SKRIPSI

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:146006134

16 Pages

Submission Date

20 Jul 2026, 14:34 GMT+7

5,711 Words

Download Date

21 Jul 2026, 12:05 GMT+7

40,543 Characters

File Name

2121020205_IZARATUPAMENAN_SYARIAH_HUKUMTATANEGARA.docx

File Size

468.7 KB

turnitin Page 2 of 20 - Integrity Overview Submission ID: tmoid:3618146006134

14% Overall Similarity

the combined total of all matches, including overlapping sources, for each submission

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 13% Internet sources
- 5% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 20 - Integrity Overview Submission ID: tmoid:3618146006134

Top Sources

13%  Internet sources
 5%  Publications
 7%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	garuda.kemdiktisaintek.go.id	5%
2	Internet	
	repository.uin-suska.ac.id	3%
3	Internet	
	peraturanpedia.id	1%
4	Student papers	
	Syntax Corporation on 2025-10-17	<1%
5	Student papers	
	Universitas Negeri Padang on 2026-06-17	<1%
6	Internet	
	journal.area1.or.id	<1%
7	Internet	
	pelitaaksara.or.id	<1%
8	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	<1%
9	Publication	
	Muhammad Aris. "REVITALISASI TRADISI TUDANG SIPULUNG DALAM MENINGKAT..."	<1%
10	Publication	
	Muhammad Ikrar Martarech, Muhammad Nur Budiyanto, Atrika Iriani. "Impleme..."	<1%
11	Internet	
	digilib-pps.insuriponorogo.ac.id	<1%

LAMPIRAN 8

LOA (LETTER OF ACCEPTANCE)

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

No: 16/LoA/Sup/VII/2025

Yang terhormat: (1) Iza Ratu Pamenan (Penulis Utama sekaligus Koresponden),
 (2) Liky Faizal (Penulis Anggota)
 (3) Susi Nurkholidah (Penulis Anggota)

Email: izaratupamenan10@gmail.com

No. HP/WA: +62 857-6417-3523

Prodi Hukum Tata Negara
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan hormat,

Artikel ilmiah dengan judul: **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN**; berdasarkan hasil review dinyatakan **diterima (accepted)** untuk diterbitkan pada **Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya** dalam versi elektronik, dan kepada Penulis Utama sekaligus Penulis Korespondensi diberikan **Letter of Acceptance (LoA)**.

Demikian Letter of Acceptance (LoA) ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Juli 2025
 Editorial board,


Bakhtiar
 Editor in Chief



LAMPIRAN 9

BUKTI PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH



SUPREMASI

**Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,
Hukum dan Pengajarannya**

p-ISSN : 1412-517X
e-ISSN : 2472-9376

Home > Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) > Pamenan
ABOUT SUPREMASI | CONTACTS

TJUALAN FIKIH SYIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG KERUSAKAN JALAN

Izta Rizka Pamenan⁽¹⁾, Lili Faizal⁽²⁾, Susil Nukholiddin⁽³⁾,

(1) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
(2)
(3)

(1) Corresponding Author

DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.74701>

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang di Desa Bumi Harjo ditinjau dari Fikih Syariah Tanfidziyah, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang langka terhadap aspek masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang desa. Dari perspektif Fikih Syariah Tanfidziyah, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya energi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengorganisasikan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

Keywords

Fikih Syariah Tanfidziyah; Peraturan Daerah; Kerusakan Jalan; Partisipasi Masyarakat

Full Text:

PDF

References

[Online Submission](#)
[Focus And Scope](#)
[Editorial Teams](#)
[Reviewers Teams](#)
[Publication Ethics](#)
[Author Guidelines](#)
[Peer Review Process](#)
[Article Fee](#)
[Advertising and Indexing](#)
[Template](#)

JULY
SUPREMA

VOLUME 20
NUMBER 2
OCTOBER 2025

AUTHOR STATISTICS

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Map

INDEX

Username:
Password:

☐ Remember me

TOPIC EDITORS

- View
- Subscribe

EDITORIAL CONTACT

Search:

Select Page: 1 2

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals
- Categories

CROSS REF

[illegible]

LAMPIRAN 10

PROSES REVISI

Home > User > Author > Archive

Archive

ACTIVE

ARCHIVE

ID	MM/DD/ SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE		STATUS
74701	06-21	ART	Pamenan, Faizal, Nurkholdah	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN... 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2020)	

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL

NEW

PUBLISHED

IGNORED

	DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
☐	2025-10-18	1	https://www.bing.com/	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-10-22	13	https://ojs.uinm.ac.id/supremasi	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-10-22	13	https://ojs.uinm.ac.id/supremasi/article/view/74701	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-10-22	4	https://ojs.uinm.ac.id/supremasi/article/view/74701...	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-11-10	3	https://ojs.uinm.ac.id/	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-11-11	2	https://ojs.uinm.ac.id/index.php/supremasi	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2025-11-15	12	https://ojs.uinm.ac.id/supremasi/issue/view/3322	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2026-01-28	1	https://www.google.com/	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2026-02-17	1	https://ojs.uinm.ac.id/supremasi/index	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE
☐	2026-04-23	1	https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.74701	TRAJUAN FIKH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN JALAN	—	New	EDIT DELETE

Online Submission

Focus And Scope

Editorial Teams

Reviewer Teams

Publication Ethics

Author Guideline

Peer Review Process

Author Fee

Abstracting and Indexing

Template

JURNAL
SUPREMASI

VISITOR STATISTICS

Visitors

20,714

33,361

2,430

866

153

127

124

118

103

100

143

61

52

51

49

46

44

33

32

29

Pageviews: 168,757

17x FLAG COUNTER

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

USER

You are logged in as...
faezulpamenan

My Journals

My Profile

Log Out

AUTHOR

Submissions

Active (0)

Archive (1)

New Submission

NOTIFICATIONS

View (0 new)

Manage

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

Categories

FONT SIZE

A S A

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

LAMPIRAN 11**DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI**

(Gambar 1. Kondisi Kerusakan Jalan di Kampung Bumi Harjo)



(Gambar 2. Foto bersama Bapak Kepala Kampung Kampung Bumi Harjo)



(Gambar 3. Wawancara dengan Perangkat Kampung)

**TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG KERUSAKAN JALAN
*FIKIH SIYASAH REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF
LOCAL REGULATION NUMBER 11 OF 2011
ON ROAD DAMAGE***

Iza Ratu Pamenan^{1*}, Lily Faizal², Susi Nurkholidah³

^{1*,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

^{1*}izaratupamenan10@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang di Kampung Bumi Harjo ditinjau dari *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kerusakan jalan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perangkat kampung, tokoh masyarakat, dan warga, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta studi pustaka. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan model *Interaktif Miles* dan *Huberman* yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif, karena masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dalam jangka waktu lama. Pemerintah daerah dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dengan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama lambatnya perbaikan. (2) Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dengan melakukan gotong royong, memperbaiki sistem drainase, dan mengusulkan program perbaikan melalui Musrenbang kampung. Dari perspektif *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, hal ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas amanah dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

KATA KUNCI: *Fikih Siyasah Tanfidziyah; Peraturan Daerah; Kerusakan Jalan; Partisipasi Masyarakat*

ABSTRACT: *This study aims to determine: (1) The implementation of Article 6 of Way Kanan Regency Regulation Number 11 of 2011 concerning Spatial Planning in Bumi Harjo Village from the perspective of Fikih Siyasah Tanfidziyah, and (2) The efforts made by the government and community to overcome road damage in the area. This study employs a qualitative approach using the case study research method. Data collection was conducted through in-depth interviews with village officials, community leaders, and residents, direct field observations, documentation, and literature review. The research instruments used include interview guidelines, field notes, and observation sheets. Data analysis techniques utilize the Interactive by Miles and Huberman, which includes data*

KEYWORDS: *Fikih Siyash Tanfidziyah; Regional Regulation; Road Damage; Community Participation*

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah pekampungan (Khalidsyah et al., 2025). Jalan yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga menjadi jalur penting bagi akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan tersedia dan dapat diakses secara layak oleh masyarakat (Akbar et al., 2024).

Dalam konteks kebijakan perencanaan wilayah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031, 2011). Pasal 6 menekankan pentingnya pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan transportasi secara berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih jauh dari harapan.

Kondisi infrastruktur jalan di Kampung Bumi Harjo, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Way Kanan, memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara ketentuan normatif dalam peraturan dan kenyataan yang dialami masyarakat. Banyak ruas jalan di Kampung tersebut mengalami kerusakan berat selama bertahun-tahun dan belum mendapatkan penanganan yang layak dari pemerintah daerah. Meskipun laporan dan aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui forum-forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tindak lanjut dari pihak pemerintah cenderung lambat dan tidak transparan. Pemerintah berdalih bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan mutlak ketika hak dasar masyarakat atas aksesibilitas dan pelayanan publik yang layak diabaikan.

Kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mengganggu ekonomi, menaikkan biaya transportasi, menurunkan produktivitas, membahayakan keselamatan, dan membatasi akses ke layanan dasar (Hasibuan et al., 2025). Kondisinya lebih parah di daerah pekampungan seperti Kabupaten Way Kanan, termasuk Kampung Bumi Harjo. Berdasarkan data per tanggal 09 Juni 2025 sumber data wawancara

kepada sekretaris kampung, hasil survei lapangan menyatakan jalan rusak di Kampung Bumi Harjo adalah sepanjang 7 kilometer (Karimun, 2025). Jenis kerusakan yang utama adalah jenis kerusakan berat seperti lubang, bebatuan, retakan, dan tanah longsor.

Fenomena ini menciptakan sebuah pertanyaan mendasar tentang akuntabilitas dan tanggung jawab moral pemerintah dalam menjalankan amanah publik. Dalam perspektif Islam, khususnya melalui kerangka *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat dengan prinsip *Maslahah* (kemanfaatan umum) dan *Amanah* (tanggung jawab) (Wahidillah et al., 2025). Ketika negara atau pemerintah daerah gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi yang tidak hanya bersifat *legalistik*, tetapi juga *etik* dan *normatif* (Raharjo, 2022). Sayangnya, kajian yang secara spesifik menghubungkan pelaksanaan peraturan daerah terkait infrastruktur dengan nilai-nilai *Fikih Siyasah* di tingkat lokal masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu serupa namun dengan fokus yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Trisna, Caniago, dan Pertiwi (2021) membahas difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang infrastruktur di Nagari Koto Baru dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah (Trisna et al., 2021). Penelitian ini menekankan pentingnya nilai-nilai *Syura* dan *Maslahat* dalam proses pembangunan, serta menyoroti bahwa

implementasi kebijakan masih didominasi oleh aktor pemerintah tanpa partisipasi setara dari masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar teknis administratif, melainkan juga

merupakan bagian dari tanggung jawab etis dan sosial pemerintah terhadap rakyat. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Frandani (2022), meneliti peran pemerintah daerah dalam penanggulangan jalan rusak di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat (Frandani, 2022). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah belum menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dan kurang mengimplementasikan prinsip *Maslahah* dan *Tanfidiyah* sebagaimana dianjurkan dalam *fikih siyasah*. Pemerintah cenderung tidak responsif terhadap keluhan masyarakat, dan solusi yang diambil bersifat sementara, bukan sistemik.

Penelitian-penelitian tersebut memperkaya diskursus tentang hubungan antara kebijakan daerah, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip *fikih siyasah*. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Pasal 6 Perda RENCANA TATA RUANG WILAYAH di tingkat Kampung dengan pendekatan *Fikih Siyasah Tanfidziyah* dan sekaligus menilai inisiatif masyarakat dalam mengisi kekosongan peran pemerintah. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini yaitu mengintegrasikan analisis normatif peraturan daerah dengan evaluasi etik berbasis *Fikih Siyasah* dalam konteks partisipatif dan mikro lokal, yakni pada tingkat kampung. Penelitian ini tidak hanya menilai kinerja pemerintah dari sisi formal, tetapi juga menggali nilai-nilai spiritual dan etis yang seharusnya melandasi kebijakan publik.

Penelitian ini juga memiliki arti penting praktis dan strategis. Pertama, hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan daerah yang lebih *Responsif* dan *Akuntabel*. Kedua, temuan-temuan dari lapangan dapat digunakan sebagai basis evaluasi bagi pemerintah Kampung maupun kabupaten dalam merancang

program infrastruktur yang partisipatif dan berkeadilan. Ketiga, pendekatan *Fikih Siyasah Tanfidziyah* yang digunakan dalam penelitian ini membuka ruang baru dalam diskursus pelayanan publik berbasis syariat Islam, di mana nilai-nilai seperti amanah, keadilan, maslahat, dan tanggung jawab sosial menjadi tolak ukur utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kampung Bumi Harjo, melalui Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, dan (2) mengidentifikasi serta mengevaluasi bentuk partisipasi dan upaya konkret masyarakat dalam menangani kerusakan jalan akibat minimnya intervensi pemerintah daerah, serta sejauh mana hal tersebut mencerminkan nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RENCANA TATA RUANG WILAYAH) di Kampung Bumi Harjo dari Perspektif *Fikih Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi untuk menggali data faktual yang bersifat kontekstual. Subjek dalam penelitian ini adalah aparat kampung, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Bumi Harjo yang secara langsung terlibat dan terdampak oleh kondisi kerusakan

jalan serta proses implementasi peraturan daerah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan peran dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan infrastruktur di kampung. Aparat

kampung dipilih karena mereka bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaporan pembangunan kampung. Tokoh masyarakat mewakili suara kolektif warga dan mengetahui sejarah pembangunan kampung, sedangkan warga dipilih berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam menghadapi kerusakan jalan.

Metode pengumpulan data meliputi tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar memperoleh informasi yang luas namun tetap terfokus; (2) Observasi lapangan, digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik jalan serta aktivitas warga terkait perbaikan jalan, dan (3) Dokumentasi berupa foto-foto kerusakan jalan, surat pengajuan perbaikan, serta berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mendukung data lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, catatan lapangan, lembar observasi, serta kamera untuk dokumentasi visual.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model *Miles* dan *Huberman* yang Interaktif. Model ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, mengarahkan, dan fokus pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua yakni Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan, dan matriks tematik yang mempermudah penarikan makna. Dan terakhir Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara bertahap dengan membandingkan

data dari berbagai sumber untuk menemukan pola, hubungan, dan makna mendalam yang berkaitan dengan implementasi kebijakan serta prinsip *Fikih Siyasah Tanfidziyah*. Langkah-langkah analisis ini dilakukan secara simultan sepanjang proses penelitian, tidak hanya

setelah data terkumpul, guna menjaga keterkaitan antara data yang diperoleh dan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 dalam Menangani Kerusakan Jalan di Kampung Bumi Harjo

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum berjalan optimal di Kampung Bumi Harjo. Peraturan daerah ini menegaskan betapa pentingnya membangun sistem jaringan transportasi yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan antar wilayah. Infrastruktur jalan dianggap sebagai sarana penting untuk mewujudkan keterpaduan sistem pergerakan orang dan barang, dan merupakan pilar utama konektivitas antar-kampung dan kecamatan (Agustin & Hariyani, 2023; Bhattacharya et al., 2012; Shamdassani, 2021). Aksesibilitas yang merata dan terintegrasi yang diharapkan dari kebijakan tersebut akan mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat waktu tempuh, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan merupakan komponen penting dalam mendorong kemajuan berkelanjutan wilayah (Aulia et al., 2024; Oktaviani et al., 2024).

Kampung Bumi Harjo ini adalah salah satu Kampung berkembang di kecamatan buay bahuga, dengan berbagai fasilitas penunjang seperti Bank, Kantor Polsek, Kantor Kecamatan, Sekolah, Koramil, Pasar, dan Puskesmas Pembantu

(Pustu), serta tempat wisata (air terjun). Kehadiran infrastruktur tersebut mencerminkan kemajuan Kampung dalam aspek sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan

pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masyarakat Kampung Bumi Harjo masih menghadapi permasalahan serius terkait kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan jalan ini menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta akses menuju fasilitas-fasilitas penting yang tersedia di kampung (Nur et al., 2021). Oleh karena itu, meskipun tergolong sebagai Kampung berkembang, Kampung Bumi Harjo masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal perbaikan dan pembangunan jalan guna menunjang kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kerusakan jalan di Kampung Bumi Harjo sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan belum mendapatkan penanganan yang memadai dari pihak terkait. Kondisi ini dapat dilihat secara langsung di beberapa titik jalan utama kampung, seperti jalan poros penghubung antara Dusun 2 dan Dusun 9, serta akses menuju pasar, Balai Kampung dan kantor kecamatan, yang permukaannya telah mengalami keretakan parah, berlubang besar, dan tergenang air saat musim hujan. Di beberapa bagian lainnya, seperti jalan menuju area wisata dan perkebunan warga, aspal telah mengelupas, menyisakan permukaan tanah berbatu yang sangat menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas. Bahkan menurut keterangan warga, jalan tersebut sudah mengalami kerusakan sejak lima belas tahun terakhir. Akibat kerusakan yang berlangsung lama ini, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan menjadi terganggu,

karena mobilitas warga yang seharusnya lancar menjadi terhambat.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan aparat kampung serta warga untuk mendapatkan data mendalam tentang masalah infrastruktur jalan di Kampung Bumi Harjo. Tujuan dari wawancara ini

adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi jalan yang rusak, tanggapan masyarakat, dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah Kampung untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kebijakan daerah, terutama Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah diterapkan di tingkat kampung. Menurut Karimun selaku sekretaris kampung Bumi menjelaskan bahwa Pemerintah Kampung telah memperhatikan masalah kerusakan jalan di Kampung Bumi Harjo sejak lama. Jalan utama yang menghubungkan antar dusun mengalami kerusakan yang signifikan, terutama selama musim hujan, katanya. Jalan yang berlubang dan penuh dengan genangan air mengganggu aktivitas masyarakat seperti transportasi hasil pertanian dan akses ke sekolah. Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah Kampung telah mengajukan proposal perbaikan jalan ke pemerintah kabupaten, tetapi anggaran belum diberikan. "Kami dari Pemerintah Kampung tidak tinggal diam, Sudah beberapa kali kami sampaikan lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tapi memang belum ada realisasi secara menyeluruh" katanya (Karimun, 2025).

Menurut Ibu Nila Sari selaku perwakilan ibu PKK, jalan-jalan di Kampung Bumi Harjo telah rusak sejak lama, terutama di bagian jalan poros yang sering digunakan oleh warga untuk melintasi antar dusun "Jalan poros itu, apalagi yang dari Dusun II ke Dusun IV, kondisinya parah banyak lubang besar, terutama selama musim hujan, yang licin

dan becek debunya juga tebal jika kemarau." Selain itu, dia menjelaskan bahwa kondisi jalan menyebabkan kegiatan ibu-ibu PKK terganggu. "Kalau pas ada posyandu atau pelatihan, banyak ibu-ibu yang telat datang." Mereka bahkan kadang-kadang

tidak ikut karena kesulitan naik motor. Dia juga mengatakan bahwa jalan licin pernah menyebabkan orang jatuh. Pemerintah Kampung telah diberitahu tentang masalah jalan ini melalui rapat dan proposal kegiatan, tetapi dia mengatakan bahwa dana Kampung tidak mencukupi, jadi masih banyak yang harus dibagi (Sari, 2025).

Menurut Yanto seorang petani dan pemilik warung di Dusun III, mengatakan bahwa kondisi jalan di kampungnya sangat memengaruhi kehidupan warga. Dia mengatakan, "Jalan ke kebun itu sekarang rusak berat, ada lubang di mana-mana, dan kalau hujan itu akan menjadi kubangan, motor sering mengalami slip, Saya juga pernah bawa pisang ke pasar dan saya jatuh karena jalan berlumpur." Ia juga menyatakan bahwa kerusakan jalan memengaruhi bisnis dan hasil pertanian secara langsung, mobil enggak mau masuk ke kebun karena takut terjebak. Oleh karena itu, hasil panen kadang-kadang telat dijual, dan kadang-kadang bahkan busuk. Jika jalan rusak, warung saya juga sepi, Orang-orang tidak suka keluar rumah, katanya (Yanto, 2025).

Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat di simpulkan bahwa implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 belum berjalan efektif. Kerusakan jalan di Kampung Bumi Harjo telah berlangsung lebih dari 15 tahun dan belum mendapatkan perbaikan signifikan dari pemerintah kabupaten. Jalan yang rusak meliputi jalur utama penghubung antar dusun, akses menuju pasar, sekolah, kantor kecamatan, hingga Puskesmas Pembantu. Kondisi ini memengaruhi kehidupan ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan Sekretaris Kampung, tokoh PKK, dan warga, yang menyatakan bahwa usulan perbaikan telah disampaikan berulang kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), namun tidak pernah ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah kabupaten. Ketidakhadiran anggaran atau minimnya transparansi penggunaan anggaran menjadi alasan klasik yang terus berulang. Realitas ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan.

Dalam perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, pemerintah (*al-wali* atau *ulil amri*) memiliki kewajiban untuk menunaikan amanah dalam bentuk pelayanan publik yang menjamin kemaslahatan rakyat (Astuti et al., 2022; Day, 2024). Salah satu bentuk pelayanan itu adalah penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jalan, yang menjadi urat nadi bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kaidah penting dalam fikih siyasah menyebutkan bahwa “*Tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*” (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat) (Idrus, 2021; Mahfuzah & Tanjung, 2024). Bila penguasa atau pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan menkampungk, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *siyasah syar’iyyah* (Herawaty et al., 2025).

Temuan penelitian ini secara umum kompatibel dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Frandani (2022) di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat (Frandani, 2022). Dalam penelitiannya, Frandani menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani jalan rusak dari perspektif fikih siyasah. Ia menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab publik belum berjalan maksimal.

Pemerintah cenderung lambat dalam merespons keluhan masyarakat, penanganan dilakukan secara parsial, dan tidak berbasis pada perencanaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat. Dalam konteks

fikih siyasah, Frandani menyimpulkan bahwa pemerintah daerah gagal memenuhi prinsip *masalah* dan *tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut. Dalam konteks Kampung Bumi Harjo, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga tidak memberikan respons konkret terhadap kerusakan jalan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Meskipun laporan dan usulan telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak ada realisasi kebijakan maupun alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan mengkampung masyarakat. Hal ini memperlihatkan adanya pola kelambanan birokrasi dan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan, sebagaimana juga ditemukan oleh Frandani.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan tematik dengan temuan Trisna et al. (2021) yang menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Baru dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Trisna et al., 2021). Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih sangat terpusat (*top-down*) dan kurang melibatkan aspirasi serta partisipasi masyarakat. Trisna et al. juga mencatat bahwa mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, sehingga masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, bukan pelaku aktif.

Temuan-temuan ini diperkuat dalam penelitian, yang menunjukkan

bahwa masyarakat Kampung Bumi Harjo akhirnya mengambil alih fungsi pemerintah dengan melakukan gotong royong dan swadaya perbaikan jalan. Partisipasi aktif warga ini sebenarnya mencerminkan bentuk *hisbah* dalam

Islam, yaitu kontrol dan koreksi masyarakat terhadap kelalaian penguasa (Amalia, 2021; Arifah et al., 2023). Namun, partisipasi ini tidak diakomodasi ke dalam sistem formal pembangunan Kampung atau kabupaten, sehingga tidak berdaya mengubah kebijakan struktural.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini kompatibel dengan dua studi sebelumnya, baik dari sisi temuan maupun kerangka teoritik. Ketiganya sama-sama menyoroti Kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip *tanfidziyah*, Lemahnya respons terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, Minimnya integrasi partisipasi warga ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun, penelitian ini juga memiliki keunggulan dan kebaruan dibanding penelitian terdahulu. Pertama, fokus penelitian ini sangat spesifik yaitu pada Pasal 6 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, bukan hanya generalisasi peran pemerintah secara umum. Kedua, cakupan penelitian dilakukan di tingkat Kampung sebagai unit mikro pelaksanaan kebijakan, sehingga menghasilkan gambaran nyata tentang relasi antara struktur kebijakan dan partisipasi masyarakat. Ketiga, pendekatan yang digunakan berbasis Fikih Siyasah Tanfidziyah secara aplikatif, dan bukan hanya sebagai wacana normatif, menjadikannya relevan sebagai model evaluasi kebijakan lokal dalam konteks Islam. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya memperluas pemahaman terhadap krisis pelaksanaan kebijakan publik dari kacamata etika pemerintahan Islam, serta mendorong reformulasi kebijakan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip *Maslahah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih siyasah, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Dengan mengkaji implementasi Pasal 6 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dalam perspektif *Fikih Siyasah Tanfidziyah*, Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti *maslahah*, *amanah*, dan *tanfidziyah* dapat digunakan secara aplikatif untuk mengevaluasi efektivitas dan etika kebijakan publik modern. Hal ini memperluas pemahaman bahwa fikih siyasah bukan sekadar teori pemerintahan klasik, tetapi juga merupakan paradigma etika pemerintahan kontemporer yang relevan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tentang urgensi membangun sistem pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan perlunya reformulasi sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar menjadi forum aspiratif yang dapat ditindaklanjuti secara konkret dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kekuatan utama dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan, serta mendorong agar inisiatif swadaya warga difasilitasi dalam kebijakan resmi, bukan sekadar dipuji secara seremonial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah penelitian terbatas hanya pada satu

kampung, yaitu Kampung Bumi Harjo, sehingga generalisasi temuan ke konteks daerah lain masih terbatas. Kedua, penelitian ini belum melibatkan instansi teknis secara langsung, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga belum tergali informasi detail mengenai aspek perencanaan dan realisasi anggaran.

Ketiga, dokumentasi partisipasi warga dalam bentuk data kuantitatif juga belum dilakukan secara menyeluruh, karena sebagian besar data yang diperoleh bersifat kualitatif.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk penelitian dan kebijakan ke depan adalah perlu dilakukan di beberapa Kampung lain untuk melihat pola yang lebih luas dan memperoleh generalisasi temuan terkait implementasi perda infrastruktur di daerah. Melibatkan Dinas PUPR dan DPRD untuk mengkaji sinergi antar lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan infrastruktur daerah.

Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pemanfaatan data spasial (peta kerusakan jalan, sebaran anggaran), akan memperkaya validitas dan kedalaman analisis. Direkomendasikan agar pendekatan *Fikih Siyasah Tanfidziyah* digunakan sebagai kerangka evaluasi oleh akademisi dan praktisi kebijakan publik Islam dalam menilai kinerja pemerintahan di berbagai sektor, tidak terbatas pada infrastruktur.

Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah

Dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat merupakan bagian dari tugas tanfidziyah. Kesejahteraan umum yang harus diusahakan oleh negara, harus didefinisikan sebagai kesejahteraan yang memungkinkan semua anggota masyarakat hidup dengan baik (Notowidagdo, 2022; Ridwan, 2021). Mencari solusi alternatif

muncul ketika infrastruktur mengalami kerusakan dan menanganinya terhambat oleh kendala struktural. Dalam kasus Kampung Bumi Harjo,

ketidakmampuan untuk menerapkan Pasal 6 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Way Kanan mendorong Pemerintah Kampung dan masyarakat untuk mengambil tindakan bersama sebagai tanggapan atas stagnasi pembangunan. Fenomena tersebut terlihat dalam upaya kolektif pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung Bumi Harjo dalam menghadapi kerusakan jalan yang berkepanjangan.

Pemerintah Kampung Bumi Harjo secara resmi menyampaikan aspirasinya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Permintaan perbaikan jalan yang dibahas di forum tersebut kemudian berkembang menjadi proposal yang dikirim ke pemerintah kecamatan dan kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten. Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung telah merespon sistem perencanaan pembangunan secara struktural. Namun, kendala utama untuk melaksanakan program tersebut adalah kekurangan anggaran dan kurangnya prioritas dari pemerintah kabupaten.

Masyarakat Bumi Harjo memulai inisiatif swadaya sebagai tanggapan atas tanggapan pemerintah kabupaten yang lambat. Salah satu bentuk nyata dari tindakan ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan secara teratur untuk menimbun jalan yang rusak dengan batu dan pasir. Perbaikan jalan dilakukan dengan bimbingan tokoh masyarakat dan partisipasi seluruh masyarakat. Aktivitas ini menunjukkan nilai solidaritas sosial yang tinggi, meskipun hasilnya sementara. Kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial didefinisikan dalam fikih siyasah sebagai partisipasi warga dalam menjaga kemaslahatan umum (Hasan & Mustafa,

2022).

Selain menambal jalan, masyarakat juga memperbaiki siring atau saluran air untuk mencegah kerusakan berulang. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan di Kampung adalah genangan

air yang tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, kerja bakti dilakukan untuk memperbaiki aliran air agar badan jalan tidak terluka. Ini adalah upaya masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara ekologis. Gotong royong yang ditunjukkan dalam pembenahan siring menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya hubungan antara infrastruktur dan lingkungan.

Disisi lain, pembangunan jalan dan pelebaran saluran air dibantu oleh Dana Kampung oleh Pemerintah Kampung. Meskipun dana yang tersedia terbatas dan harus didistribusikan ke berbagai sektor, Pemerintah Kampung tetap bertanggung jawab atas upaya ini atas nama warganya. Sebagai pelayan publik, Pemerintah Kampung bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bawah. Namun, proyek berskala besar seperti pengaspalan dan pelebaran jalan masih membutuhkan dana di tingkat kabupaten atau provinsi. Pembangunan akan sangat lambat jika tidak ada intervensi dari pihak berwenang yang lebih tinggi.

Masyarakat Bumi Harjo sangat memperhatikan transparansi anggaran. Mereka meminta informasi tentang alokasi dan pelaksanaan anggaran pembangunan dipublikasikan. Dalam fikih siyasah, prinsip amanah menempatkan penguasa sebagai perwakilan umat yang harus bersikap adil dan jujur (Setiawan, 2023; Shofiyah et al., 2024). Keterutupan informasi hanya akan menambah jarak antara warga dan orang-orang yang mereka pimpin. Transparansi sekarang menjadi salah satu ukuran utama akuntabilitas pemerintahan.

Kerusakan jalan ke ranah publik yang lebih luas diangkat dengan aktif oleh

masyarakat melalui media sosial dan teknologi informasi. Seperti video, dan foto warga diunggah ke akun pemerintah daerah dan diunggah ke platform seperti YouTube dan Facebook. Media digital

telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan tekanan publik dan secara damai menyuarakan keprihatinan warga (Al Mustaqim et al., 2024). Dalam fikih siyasah, ini adalah jenis *amar ma'ruf nahi munkar* dengan media yang relevan dengan zaman (Ali, 2023; Rizha, 2021). Selama hak-hak rakyat dilindungi, advokasi undang-undang jenis ini diizinkan.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan politik ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat Bumi Harjo. Mereka tidak hanya memahami hak-haknya tetapi juga tahu cara memperjuangkannya. Jika terjadi kelalaian penguasa, rakyat Islam memiliki hak untuk menegur dan mengkritik mereka. Untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, prinsip-prinsip ini telah berkembang menjadi dasar yang sangat penting. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat masuk ke dalam mekanisme check and balance yang diakui oleh syariat.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kampung Bumi Harjo menunjukkan praktik Fikih Siyasah Tanfidziyah lokal. Model kolaborasi rakyat dan pemimpin dibentuk oleh kombinasi antara jalur formal yang ditunjukkan melalui proposal dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan jalur swadaya yang ditunjukkan melalui gotong royong dan pembenahan siring. Namun, sebagai pemegang otoritas struktural, pemerintah kabupaten tetap bertanggung jawab utama. Kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan akan berkurang jika pembangunan jalan tidak dimulai segera. Oleh karena itu, Pasal 6 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Way Kanan harus diterapkan sebagai alat kebijakan yang

benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sekadar aturan formal.

Kebaruan dari temuan ini adalah menempatkan upaya masyarakat sebagai

aktor aktif dalam fikih siyasah, bukan sekadar pelengkap, dan memperlihatkan praktik tanfidziyah lokal yang tidak banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya.

Implikasi praktisnya, jika pola swadaya terus berlangsung tanpa intervensi struktural, maka kelelahan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan partisipatif kolaboratif dan menjadikan inisiatif warga sebagai indikator prioritas kebijakan. Keterbatasan bagian ini adalah tidak semua bentuk gotong royong dan pembiayaan warga terdokumentasi secara sistematis. Rekomendasinya, pemerintah Kampung perlu mengarsipkan seluruh kegiatan swadaya warga sebagai bahan bukti partisipatif yang bisa diperkuat dalam perencanaan anggaran ke depan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kampung Bumi Harjo belum berjalan dengan baik., sebagaimana ditunjukkan oleh kerusakan jalan yang telah berlangsung lama tanpa penanganan dari pemerintah kabupaten. Temuan ini menjawab tujuan pertama penelitian bahwa pelaksanaan perda tidak mencerminkan prinsip pelayanan publik yang adil dan maslahat sebagaimana diatur dalam Fikih Siyasah Tanfidziyah.

Tujuan kedua juga terpenuhi, yaitu mengidentifikasi upaya masyarakat dan pemerintah Kampung dalam menangani masalah ini. Masyarakat terbukti aktif melakukan gotong royong, perbaikan drainase, hingga menyampaikan aspirasi

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan media

sosial. Ini mencerminkan prinsip hisbah dan partisipasi publik yang kuat dalam fikih siyasah.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah penerapan konsep Fikih Siyasah Tanfidziyah secara aplikatif dalam mengevaluasi kebijakan publik daerah. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar penting bagi pemerintah daerah untuk mereformasi sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup wilayah yang terbatas pada satu Kampung serta belum melibatkan dinas teknis secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ke depan melibatkan lebih banyak wilayah dan instansi terkait, menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif-kualitatif, serta menjadikan fikih siyasah sebagai kerangka evaluatif untuk memperkuat etika kebijakan publik berbasis syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023).

Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah. Universitas Brawijaya Press. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=UOm1EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Infrastruktur+jalan+dianggap+sebagai+sarana+penting+untuk+mewujudkan+keterpaduan+sistem+pergerakan+orang+dan+barang&ots=4vdrwAW-6b&sig=tKCPTMXRaLgvs__p2KYFAQdfRuM

Akbar, F., Pasaribu, A. S., Astawa, I. K., Larasati, C. B., & Sari, D. (2024). PERAN HUKUM INVESTASI

- DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ACEH UTARA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3).
<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/598> Al
- Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Ali, F. (2023). Representasi Qs. Al-Imran: 104 “Analisis atas Nilai Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Konten Video Tiktok (VT) Dakwah Muezza.” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i2.429>
- Amalia, Y. S. (2021). *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāṣah Dustūriyah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/26247>
- Arifah, U., Baroroh, N., & Muttaharoh, S. (2023). Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>
- Astuti, A., Afriyah, Z., Ningsih, S., Pranata, A., & Jannah, R. T. (2022). Kepemimpinan Dalam Islam. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(01), 72–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.242>

- 52/edu.v2i01.29939
- Aulia, S., Anisa, S. N., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1>
- Bhattacharya, A., Romani, M., & Stern, N. (2012). Infrastructure for development: meeting the challenge. In *CCCEP, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and G* (Vol. 24).
- Day, G. S. S. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 39–48. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/656/392>
- Frاندani, H. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menaggulangi Jalan Rusak Perspektif Fiqih Syisah (Studi Di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasan, N. A., & Mustafa, A. (2022). PARTISIPASI WAHDAH ISLAMIYAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syisah Syar'iyah*, 3(3), 537–548. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/26860>
- Hasibuan, W. A., Susanti, F. D., Zaskia, N., & Zahrah, N. H. (2025). Studi Kasus Dampak Jalan Rusak Terhadap Mobilitas dan Aktivitas

- Mahasiswa di Mustamindo, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, RIAU. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/2375>
- Herawaty, A., Islam, U., Alauddin, N., Makassar, U. N., Koresponden, P., Siyasaah, F., Eksekutif, P., & Islam, P. (2025). *Konsep Amanah Dalam Perspektif Fikih Siyasaah : Implikasinya Terhadap Perilaku Pejabat Eksekutif*. XX(April), 77–84. <http://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/71128/32382>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Karimun. (2025). *Wawancara dengan Karimun sekretaris kampung di Balai kampung Bumi Harjo pada tanggal 09 Juni 2025*.
- Khalidsyah, M. R. R., Putra, D. A., & Amaliatulwalidain, A. (2025). Peran Kepala Kampung dalam Pengelolaan Infrastruktur Kampung untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Kampung Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin. *The Journalish: Social and Government*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v6i2.900>
- Mahfuzah, N. Z., & Tanjung, D. (2024). Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(2), 254. <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/882>
- Notowidagdo, R. (2022). *Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan iman dan takwa*. Amzah. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=m3hmEAAQBAJ&oi=f>

nd&pg=PP1&dq=Kesejahteraan+um
um+yang+harus+diusahakan+oleh+
negara,+harus+didefinisikan+sebagai+
i+kesejahteraan+yang+memungkink
an+semua+anggota+masyarakat+hid
up+dengan+baik&ots=QyUsP8LWh

0&sig=nld3Z-
gmIEa9yJMoyXbHaUP6irE

Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin,
M., Halim, H., Tumpu, M.,
Sugiyanto, G., Radjawane, L. E.,
Ahmad, S. N., & Rosyida, E. E.
(2021). *Sistem transportasi*. Yayasan
Kita Menulis.
[http://repository.unifa.ac.id/id/eprint/
29/1/Sistem Transportasi.pdf](http://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem%20Transportasi.pdf)

Oktaviani, V. R., Lestari, A., Prayudha,
G. A., & Malik, A. (2024). Pengaruh
Pembangunan Infrastruktur Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Daerah. *Jurnal Intelek Dan
Cendekiawan Nusantara*, 1(6),
9882–9892.

[https://jicnusantara.com/index.php/ji
cn/article/download/1823/1935](https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1823/1935)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2011-2031
(2011).

[https://peraturan.bpk.go.id/Downloa
d/105181/PERDA_11_2011.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/105181/PERDA_11_2011.pdf)

Raharjo, M. M. (2022). *Manajemen
Pelayanan Publik*. Bumi Aksara.
[https://www.google.com/books?hl=i
d&lr=&id=G8l8EAAQBAJ&oi=fn
d&pg=PP1&dq=Ketika+negara+ata
u+pemerintah+daerah+gagal+melak
sanakan+kewajiban+tersebut,+maka
+perlu+dilakukan+evaluasi+yang+ti
dak+hanya+bersifat+legalistik,+teta
pi+juga+etik+dan+normatif&ots=Ca
97u](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=G8l8EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ketika+negara+atau+pemerintah+daerah+gagal+melaksanakan+kewajiban+tersebut,+maka+perlu+dilakukan+evaluasi+yang+tidak+hanya+bersifat+legalistik,+teta+pi+juga+etik+dan+normatif&ots=Ca97u)

Ridwan, S. P. (2021). *Tingkat
Pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat Menjalin Kerukunan*

Umat Beragama. CV. Azka
Pustaka.
https://books.google.co.id/books?id=Nb5ZEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summa ry_r&cad=0
Rizha, F. (2021). Implementasi amar

- ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan sosial. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 123–138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.516>
- Sari, N. (2025). *Wawancara dengan PKK kampung di Balai kampung Bumi Harjo pada tanggal 09 Juni 2025*.
- Setiawan, Z. S. Z. (2023). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68–75.
<https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>
- Shamdasani, Y. (2021). Rural road infrastructure & agricultural production: Evidence from India. *Journal of Development Economics*, 152, 102686.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102686>
- Shofiyah, R., Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Majid, A. B. A. (2024). Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Trisna, Y., Caniago, S., & Pertiwi, D. (2021). IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 39–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2871>
- Wahidillah, N., Apriyani, S. R., Meilani, V. R., & Ashari, Z. M. (2025). Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.488>
- Yanto. (2025). *Wawancara dengan warga kampung di kampung Bumi Harjo pada tanggal 10 Juni 2025*.

